



Greenpeace dan Politik Lingkungan: Analisis Gerakan Masyarakat Sipil dalam Kerangka Environmentalism di Indonesia

Muhamad Fathan Mandela¹

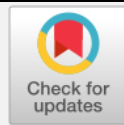
¹ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Selamat Sri, 51263, Jawa Tengah - Indonesia

*Korespondensi: fmandela271@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

31 Maret 2026



Artikel dengan akses terbuka

Hak Cipta© 2026 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Cantuman Sitasi:

Mandela, M. F. (2026). Greenpeace dan Politik Lingkungan: Analisis Gerakan Masyarakat Sipil dalam Kerangka Environmentalism di Indonesia. *Journal of Politics and Democracy*, 5(2), 71-81. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v5i1.171>

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis peran Greenpeace sebagai gerakan masyarakat sipil dalam isu lingkungan dengan menggunakan kerangka environmentalism dan keadilan lingkungan. Kajian ini berangkat dari keterbatasan studi gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang masih jarang mengaitkan praktik aktivisme lingkungan dengan pendekatan teoretis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan untuk memahami strategi, bentuk aksi, dan posisi Greenpeace dalam dinamika politik lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace tidak hanya berperan sebagai organisasi advokasi, tetapi juga sebagai aktor gerakan masyarakat sipil yang secara aktif mengoperasionalkan prinsip environmentalism melalui kampanye, mobilisasi publik, dan konfrontasi terhadap negara serta korporasi. Aksi-aksi tersebut didorong oleh ketidakadilan dalam distribusi dampak lingkungan dan diarahkan untuk menekan perubahan kebijakan serta praktik ekonomi yang merusak lingkungan. Dalam konteks Indonesia, Greenpeace mampu menjembatani wacana global tentang perlindungan lingkungan dengan realitas lokal melalui berbagai kampanye strategis. Dengan demikian, Greenpeace memainkan peran penting dalam memperkuat posisi masyarakat sipil sekaligus mendorong agenda keadilan lingkungan dalam praktik kebijakan publik.

Abstract

This article analyzes the role of Greenpeace as a civil society movement in environmental issues using the frameworks of environmentalism and environmental justice. The study addresses the limited scholarship in Indonesia that systematically links environmental activism with these theoretical approaches. This research employs a qualitative method with a descriptive-



analytical approach through a literature review to examine Greenpeace's strategies, forms of action, and position within environmental politics. The findings show that Greenpeace does not merely function as an environmental advocacy organization but also acts as a civil society movement that actively operationalizes environmentalism through campaigns, public mobilization, and direct confrontation with both state and corporate actors. These actions are driven by inequalities in the distribution of environmental impacts and aim to pressure policy changes and unsustainable economic practices. In the Indonesian context, Greenpeace has played a significant role in bridging global environmental discourse with local realities through various strategic campaigns. Therefore, Greenpeace strengthens the role of civil society while advancing the agenda of environmental justice in public policy.

Kata Kunci Enviromentalism, Greenpeace, Gerakan Masyarakat

1. Pendahuluan

Sejarah mencatat bahwa gerakan masyarakat sipil di beberapa negara diilhami oleh pemerintahan otoritarian yang dijalankan secara sewenang-wenang, periode pasca perang dunia kedua yang biasa disebut oleh para ahli sebagai gelombang kedua demokratisasi memunculkan diskursus di negara-negara Asia mengenai gerakan masyarakat sipil sebagai gerakan perlawanan terhadap otoritas negara yang dianggap mengancam iklim kehidupan demokrasi karena dipimpin oleh rezim otoritarian. Hubungan antara masyarakat sipil dan negara di Asia menurut Aspinal dalam Alagappa (2004) menampilkan ciri hubungan yang tidak monoton, terkadang masyarakat sipil sangat kritis, reaktif, radikal, dan militan dalam berhadapan dengan negara. Namun juga sering bergandengan tangan dan bermesraan dengan negara.

Gerakan masyarakat sipil lazimnya akan memakan korban karena berkonfrontasi secara langsung dengan negara, gerakan masyarakat sipil mulai muncul pada abad ke-18 (Tarrow. 2011), gerakan tersebut identik dengan kekuatan kolektif sebagai respon terhadap kekuatan yang terlalu besar dan mengesampingkan hak-hak masyarakat sipil. Dalam perjalanannya gerakan masyarakat sipil dapat melahirkan tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Italia atau gerakan yang tidak melahirkan tindakan kekerasan seperti yang terjadi di India dan Filipina. Dewasa ini dekade pasca perang dunia kedua gerakan masyarakat sipil tidak hanya berfokus dalam diskursus demokratisasi semata, pembicaraan isu lingkungan sudah mulai terdengar akibar dari ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam.

Isu lingkungan menurut Kate O'Neil dalam Wahyudin (2020) muncul dalam diskursus politik dunia sebagai isu ketiga setelah keamanan internasional dan perekonomian global, hadinya isu lingkungan dalam fenomena sosial dan politik karena adanya kerusakan alam yang diakibatkan oleh ulah manusia, sejalan dengan itu Paul Crutzen dan Eugene Stoermer berpendapat bahwa manusia telah menggantikan alam sebagai kekuatan lingkungan yang dominan di muka bumi, karena dominasi itulah manusia sekarang sudah berubah menjadi pelaku utama dalam isu lingkungan termasuk dalam kerusakan lingkungan (Plumer. 2015)

Kondisi tersebut akhirnya merangsang organisasi non pemerintah untuk hadir dan membentuk gerakan masyarakat sipil, selain itu meningkatkannya tingkat kesadaran masyarakat luas akan bahaya lingkungan yang dirusak dan mengancam kelestarian lingkungan hidup membuat masyarakat luas tergerak untuk menantang dan melakukan perlawanan terhadap mereka yang berniat melakukan perusakan lingkungan. Salah satu organisasi non pemerintah yang hadir dan melakukan gerakan sosial dalam menentang dan melakukan perlawanan terhadap perusak lingkungan adalah greenpeace.

Sebagai organisasi independen greenpeace menyampaikan alternatif solusi untuk terciptanya masa depan yang hijau dan damai, dalam melakukan aksinya greenpeace memakai cara kreatif namun juga konfrontatif tetapi nirkekerasan (Nugraha. 2021). Dalam laman resmi greenpeace.org saat ini keanggotan mereka secara global mencapai 2.8 juta, sebagai organisasi non pemerintah dengan skala internasional greenpeace berkampanye untuk perlindungan lingkungan secara global yang berkantor pusat di Amsterdam Belanda dan memiliki kantor regional di 41 negara termasuk di Indonesia.

Greenpeace pada akhirnya melakukan gerakan sosial dengan anggota dari masyarakat luas dan tak jarang vis a vis dengan banyak negara dan perusahaan untuk kampanye lingkungan mereka. Menarik untuk ditelusuri bagaimana greenpeace ada sebagai gerakan masyarakat sipil yang fokus dalam isu lingkungan, sebagaimana kita ketahui bahwa dekade pasca perang dunia kedua banyak gerakan masyarakat sipil lahir karena nuansa demokratisasi di negara tersebut, solah menjadi oase kehadiran greenpeace sebagai gerakan sosial telah banyak mempengaruhi kebijakan negara soal lingkungan hidup. Untuk itu dalam tulisan ini memunculkan pertanyaan bagaimana peran greenpeace sebagai gerakan masyarakat sipil hadir dalam isu lingkungan, sehingga dalam pembahasan nanti pertanyaan yang akan dijawab adalah aksi kolektif yang pernah dilakukan oleh greenpeace termasuk greenpeace Indonesia sebagai bagian dari kantor regional.

Beberapa penelitian tentang gerakan masyarakat telah dilakukan oleh beberapa sarjana, seperti oleh Rahmandani & Samsuri (2019) yang melakukan gerakan masyarakat sipil melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) Malang Corruption Watch, sebagai LSM yang berfokus dalam aksi memberantas korupsi cara-cara yang digunakan oleh mereka adalah dengan melakukan sekolah anti korupsi, mengkampanyekan gerakan anti korupsi, mengawal pelayanan public, pendidikan politik rakyat dan sekolah rakyat. sebagai bentuk gerakan masyarakat sipil yang menjunjung nilai zero tolerance for corruption dalam mewujudkan demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Terdapat juga Arianto (2022) yang melakukan penelitian gerakan masyarakat sipil diruang digital Twitter, dalam pembahasannya Arianto menyebutkan bahwa gerakan yang ada dibangun melalui media sosial oleh simpul masyarakat sipil sebagai ciri aktivisme digital yang meliputi social awareness (kepedulian sosial), social engagement (keterikatan sosial), dan social activism (aktivisme sosial). Media sosial dewasa ini berfungsi sebagai aktivisme digital yang bergerak dengan tujuan utama untuk melakukan penyebaran gagasan, agitasi, advokasi, dan kritik sosial.

Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil juga berkembang dalam sektor ekonomi kerakyatan, seperti yang ditunjukkan oleh Maksun (2016) dalam kajiannya tentang Konsorsium Rakyat Jombang Berdaulat (KRJB). Gerakan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti pemuda, pedagang kaki lima, kelompok perempuan, petani, hingga pekerja informal lainnya. Aktivitas yang dilakukan tidak hanya bersifat advokatif, tetapi juga produktif melalui pelatihan keterampilan seperti sablon, peternakan, dan budidaya jamur. Tujuan utama dari gerakan ini

adalah membangun kedaulatan ekonomi masyarakat melalui kerja kolektif, yang diwujudkan dalam pembentukan koperasi sebagai instrumen ekonomi alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi sekaligus sebagai bentuk resistensi terhadap struktur ekonomi yang tidak adil (Melucci, 1996).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika gerakan masyarakat sipil, terdapat kecenderungan bahwa kajian-kajian tersebut lebih banyak berfokus pada isu demokrasi, korupsi, aktivisme digital, dan ekonomi kerakyatan. Sementara itu, kajian yang secara spesifik mengelaborasi gerakan masyarakat sipil dalam konteks isu lingkungan, khususnya dengan menggunakan kerangka environmentalism dan environmental justice, masih relatif terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Padahal, dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan telah menjadi salah satu arena utama kontestasi politik global yang melibatkan berbagai aktor, termasuk organisasi non-pemerintah transnasional (Doherty & Doyle, 2013).

Berangkat dari kekosongan tersebut, artikel ini secara khusus memfokuskan kajian pada peran Greenpeace sebagai gerakan masyarakat sipil dalam isu lingkungan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung melihat gerakan masyarakat sipil dalam konteks sektoral tertentu, tulisan ini berupaya mengintegrasikan analisis gerakan sosial dengan pendekatan environmentalism untuk menjelaskan bagaimana Greenpeace membangun aksi kolektif, strategi kampanye, serta bentuk konfrontasi terhadap aktor negara dan korporasi dalam isu kerusakan lingkungan. Dengan demikian, research gap yang ingin diisi dalam artikel ini adalah kurangnya kajian yang menghubungkan secara sistematis antara teori gerakan masyarakat sipil, praktik aktivisme lingkungan global, dan implementasinya dalam konteks lokal Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam fenomena gerakan masyarakat sipil dalam isu lingkungan, khususnya yang dilakukan oleh Greenpeace. Penulis memilih pendekatan kualitatif karena ingin menelusuri makna, strategi, dan dinamika gerakan yang tidak dapat dijelaskan melalui angka, melainkan melalui interpretasi terhadap data sosial (Denzin & Lincoln, 2023; Moleong, 2015). Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan penulis tidak hanya memaparkan fakta empiris, tetapi juga menganalisis pola gerakan, strategi kampanye, serta posisi Greenpeace dalam kerangka environmentalism. Dengan cara ini, penulis menghubungkan data empiris dengan kerangka teoretis secara sistematis agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Penulis tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung dengan wawancara, sehingga penulis menggunakan studi kepustakaan dalam pengambilan data. Menurut Ibnu, Mukhadis & Dasna (2003) sumber kepustakaan bisa berasal ensiklopedia, kamus, buku, direktori, biografi, indeks, abstrak, laporan penelitian, majalah, jurnal, surat kabar, skripsi, tesis, ataupun disertasi yang masih relevan dengan tema besar tulisan yang sedang kita kerjakan. Penulis kemudian menyeleksi dan mengkategorikan data berdasarkan fokus penelitian, lalu menyajikannya dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan interpretasi. Dalam tahap akhir, penulis menarik kesimpulan dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka teori yang digunakan sehingga mampu menjelaskan peran Greenpeace sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam isu lingkungan secara lebih mendalam.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam menganalisis fenomena kerusakan lingkungan, penelitian ini menggunakan pendekatan gerakan environmentalism sebagai kerangka utama. Gerakan environmentalism muncul sebagai respons terhadap krisis lingkungan global yang semakin kompleks dan meluas. Gerakan ini berfokus pada berbagai isu strategis seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, pencemaran air dan udara, kepunahan spesies, kebakaran hutan, pencemaran sungai dan laut, serta ancaman industrialisasi dan rekayasa teknologi terhadap keberlanjutan ekosistem. Aktor dalam gerakan ini tidak hanya berasal dari organisasi formal, tetapi juga individu yang memiliki kesadaran ekologis. Para sarjana mulai mengembangkan dan menggunakan konsep environmentalism secara luas sejak dekade 1960-an, meskipun akar pemikirannya telah muncul sejak abad ke-19 melalui kritik terhadap industrialisasi oleh pemikir seperti John Ruskin dan William Morris yang menyoroti dampak eksploitasi alam terhadap kehidupan manusia (Pepper, 1996; Doyle & McEachern, 2007).

Gerakan environmentalism memperoleh momentum penting ketika Rachel Carson menerbitkan *Silent Spring* pada tahun 1962. Melalui karya tersebut, Carson secara sistematis mengungkap dampak destruktif penggunaan pestisida dan bahan kimia industri terhadap ekosistem dan kesehatan manusia, sehingga mendorong lahirnya kesadaran lingkungan modern. Selain itu, Arne Naess mengembangkan konsep *deep ecology* yang menekankan bahwa manusia tidak berada di atas alam, melainkan menjadi bagian integral dari ekosistem yang saling bergantung. Naess menolak pandangan antroposentris yang eksploitatif dan mendorong manusia untuk membangun relasi yang etis dan berkelanjutan dengan alam (Naess, 1973). Kompleksitas persoalan lingkungan kemudian mendorong komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk merumuskan prinsip-prinsip global melalui Konferensi Stockholm 1972 sebagai dasar normatif bagi perlindungan lingkungan hidup (Lestari, 2016).

Seiring dengan perkembangan environmentalism, muncul pula pendekatan *environmental justice* atau keadilan lingkungan yang menyoroti dimensi ketimpangan dalam distribusi dampak lingkungan. Pendekatan ini berkembang dari pengalaman historis gerakan hak sipil di Amerika Serikat, khususnya perjuangan kelompok masyarakat kulit hitam dan berpenghasilan rendah yang menanggung beban pencemaran lingkungan secara tidak proporsional. Gerakan ini kemudian memperkenalkan konsep rasisme lingkungan untuk menggambarkan ketidakadilan struktural tersebut. Dalam konteks ini, keadilan lingkungan tidak hanya berbicara tentang perlindungan alam, tetapi juga tentang distribusi yang adil atas manfaat dan risiko lingkungan di antara kelompok sosial (Finger & Zorzi, 2013; Schlosberg, 2007).

Secara konseptual, keadilan lingkungan menekankan pengakuan terhadap perbedaan sosial serta distribusi yang setara atas sumber daya dan beban lingkungan. Dengan demikian, diskursus keadilan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari isu keadilan sosial yang lebih luas. Dalam ranah politik global, Finger dan Zorzi (2013) menilai bahwa tantangan utama terletak pada integrasi prinsip kesetaraan ke dalam institusi dan kebijakan lingkungan internasional. Negara-negara maju di belahan dunia utara masih mendominasi proses pengambilan keputusan dalam institusi global seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sehingga seringkali mengabaikan perspektif negara-negara berkembang yang justru mengalami dampak lingkungan lebih besar.

Perkembangan environmentalism dan keadilan lingkungan menunjukkan bahwa manusia tidak lagi sekadar menjadi bagian dari alam, tetapi telah menjadi aktor utama yang menentukan arah keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Gerakan environmentalism hadir sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk mengoreksi praktik eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran negara dan aktor non-negara menjadi krusial untuk membangun sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam. Tanpa adanya kolaborasi tersebut, upaya menjaga keberlanjutan lingkungan akan sulit tercapai, dan kerusakan ekologis akan terus mengancam kehidupan manusia di masa depan.

Dengan demikian, environmentalism dan keadilan lingkungan tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga menuntut praktik konkret dalam bentuk aksi kolektif yang mampu menantang aktor-aktor yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, Greenpeace dapat dipahami sebagai representasi nyata dari gerakan environmentalism yang tidak hanya membangun kesadaran ekologis, tetapi juga secara aktif merespons ketidakadilan lingkungan melalui kampanye, advokasi, dan konfrontasi terhadap negara maupun korporasi. Oleh karena itu, analisis terhadap Greenpeace menjadi relevan untuk melihat bagaimana konsep environmentalism dioperasionalkan dalam praktik gerakan masyarakat sipil, khususnya dalam konteks Indonesia.

Greenpeace dan aksinya di Indonesia

Sebagai bagian dari gerakan environmentalism, Greenpeace beroperasi tidak hanya sebagai organisasi advokasi, tetapi juga sebagai aktor yang mentransformasikan kesadaran ekologis menjadi aksi kolektif yang terorganisir. Greenpeace menerjemahkan isu kerusakan lingkungan ke dalam strategi kampanye yang sistematis dengan tujuan menekan aktor negara dan korporasi. Dalam kerangka keadilan lingkungan, tindakan tersebut menunjukkan upaya untuk menantang ketimpangan distribusi dampak lingkungan yang selama ini lebih banyak ditanggung oleh kelompok masyarakat luas. Dengan posisi ini, aktivitas Greenpeace tidak dapat dipahami semata sebagai kampanye lingkungan, tetapi sebagai praktik gerakan masyarakat sipil yang berorientasi pada perubahan struktural.

Greenpeace merupakan organisasi gerakan lingkungan internasional yang terkemuka, organisasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan sebagai kelompok penekan dalam membentuk kebijakan lingkungan dunia, dalam Susanto (2007) greenpeace pertama kali lahir pada tahun 1969 oleh sekelompok pencinta lingkungan di wilayah Vancouver, seperti kata Jenkins (1983) bahwa terdapat alasan dari sebuah gerakan yang tercipta, greenpeace didirikan untuk menentang uji coba nuklir bawah tanah yang dilakukan oleh komisi energi atom Amerika Serikat di ulau Aleutian Alaska. Mereka melakukan aksi protes dengan melayarkan kapal tua Phyllis Cormack ke pulau Amchitka sebagai tempat uji coba nuklir, salah satu alasan mereka melakukan aksi itu karena yang merupakan tempat perlindungan terakhir bagi 3.000 berang-berang dan rumah elang kepala botak dan satwa liar lainnya.

Greenpeace mempunyai keyakinan bahwa kunci keberhasilan dalam melindungi lingkungan adalah dengan mengubah cara banyak orang memahami dunia, oleh karena itu mereka menerapkan dua strategi dalam kampanyenya, yaitu dengan hanya mencoba membawa contoh penyalahgunaan lingkungan untuk menjadi perhatian banyak orang di seluruh dunia dengan begitu aksi mereka tersampaikan kepada masyarakat luas. Dan dengan mengungkap kesenjangan antara retorika dan praktiknya, bisa berasal dari perusahaan hingga warga negara

biasa bahkan negara dan menuntut penjelasan atas hal tersebut, sehingga dengan begitu tidak ada fakta yang tertutupi dalam permasalahan lingkungan (Susanto. 2007).

Greenpeace oleh Eyerman & Jamison (1989) dicirikan sebagai contoh terbaik dari gerakan sosial karena kumpulan para aktor yang ada dapat memaksimalkan kepentingan mereka dalam aktivitas yang diarahkan pada tujuan. Unikny secara organisasi greenpeace tidak terlalu banyak menggunakan relawan dalam system organisasi mereka terutama dalam posisi kunci, mereka membangun pengetahuan dan keterampilan para profesional yang terlatih di bidang bisnis, periklanan, media, dan sebagainya, yang dimana relawan berlatarbelakang aktivis seringkali tidak memiliki keahlian seperti itu, yang harus dicari di tempat lain. Kemudian greenpeace sangat berhati-hati dengan pandangan politik orang-orang yang bekerja di kantor mereka, setiap orang yang bekerja dengan mereka dan terutama staf yang dibayar harus diseleksi dengan ketat mengenai pandangan politik mereka serta aktivitas mereka di masa lampau.

Sebagai organisasi besar, Greenpeace tidak menjalankan aksi secara spontan tanpa perhitungan yang matang. Organisasi ini merancang setiap kampanye melalui perencanaan strategis yang sistematis, termasuk melakukan riset mendalam, analisis risiko, serta perhitungan biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Greenpeace mengombinasikan idealisme gerakan sosial dengan rasionalitas organisasi modern. Tingkat keberhasilan kampanye yang mereka capai tidak hanya bergantung pada aksi lapangan, tetapi juga pada kemampuan mereka membangun opini publik dan memanfaatkan media sebagai alat tekanan politik. Dalam konteks ini, Greenpeace berhasil mentransformasikan isu lingkungan menjadi isu publik yang memiliki dimensi moral yang kuat, sehingga memaksa pemerintah dan korporasi untuk meresponsnya secara serius. Dengan kata lain, Greenpeace tidak hanya berfungsi sebagai aktor advokasi, tetapi juga sebagai produsen wacana yang mampu membingkai isu lingkungan sebagai persoalan etis antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan, yang pada akhirnya memperkuat posisi mereka sebagai kelompok penekan dalam arena politik global (Eden, 2004; Eyerman & Jamison, 1989).

Sejarah mencatat Greenpeace sebagai gerakan masyarakat sipil yang secara konsisten menjalankan berbagai kampanye strategis, mulai dari pengungkapan kasus, peningkatan kesadaran publik, pendidikan lingkungan, hingga lobi politik. Greenpeace tidak bergerak secara sporadis, tetapi mengarahkan setiap aksinya untuk menekan aktor negara dan korporasi agar merespons krisis lingkungan secara konkret. Pendekatan ini sejalan dengan misi mereka sebagai organisasi kampanye independen yang mengandalkan konfrontasi kreatif tanpa kekerasan untuk mengekspos masalah lingkungan global sekaligus mendorong lahirnya solusi yang berkelanjutan. Greenpeace menetapkan tujuan yang jelas, yaitu memastikan Bumi tetap mampu memelihara kehidupan dalam seluruh keragamannya. Orientasi ini menempatkan Greenpeace tidak hanya sebagai aktor advokasi, tetapi juga sebagai kekuatan normatif yang membingkai isu lingkungan sebagai tanggung jawab kolektif umat manusia. Dengan posisi tersebut, Greenpeace mampu menghubungkan aksi kampanye dengan tekanan politik dan perubahan kebijakan, sehingga narasi gerakan tetap konsisten dan relevan ketika berhadapan dengan konteks lokal maupun global (Eden, 2004).

Greenpeace telah menjalankan berbagai kampanye lingkungan dalam skala global dengan fokus pada isu-isu strategis. Organisasi ini menginisiasi kampanye anti-nuklir dan menentang praktik penangkapan ikan paus, yang kemudian berkontribusi pada keputusan Komisi

Penangkapan Ikan Paus Internasional untuk menetapkan moratorium penangkapan ikan paus pada tahun 1982. Selain itu, Greenpeace juga mengkampanyekan penolakan terhadap pemusnahan anak anjing laut pada tahun 1976, serta mengangkat isu racun dan polusi pada pertengahan 1970-an. Memasuki dekade 1990-an, Greenpeace memperluas fokusnya dengan menyoroti persoalan hujan asam, polusi udara, penipisan ozon, dan pemanasan global sebagai bagian dari agenda lingkungan global yang semakin kompleks. Salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Greenpeace terjadi ketika kapal Rainbow Warrior yang berlabuh di pelabuhan Auckland, Selandia Baru, dan bersiap berlayar menuju Mururoa, meledak akibat serangan ranjau limpet. Insiden tersebut menyebabkan kapal tenggelam dan menewaskan seorang fotografer. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi Greenpeace dalam menjalankan kampanye, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai aktor gerakan lingkungan yang berani menantang kepentingan negara dalam isu lingkungan.

Dalam menjalankan kampanye, Greenpeace mengembangkan strategi khas yang menggabungkan aksi langsung non-kekerasan dengan penggunaan media secara intensif. Organisasi ini secara konsisten menggunakan kapal sebagai alat utama untuk melakukan protes fisik terhadap berbagai pelanggaran lingkungan, sekaligus menjadikannya simbol perlawanan di ruang publik global. Di saat yang sama, Greenpeace secara aktif mendokumentasikan setiap aksi melalui produksi film dan materi visual, baik dengan perangkat internal maupun melalui keterlibatan jurnalis, sehingga mereka mampu menyampaikan peristiwa secara langsung kepada publik dan membangun tekanan opini yang luas. Greenpeace juga memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk memperkuat jangkauan kampanyenya. Mereka tidak hanya menyampaikan laporan secara rutin melalui platform daring, tetapi juga menyediakan materi visual yang dapat diunduh dan disebarluaskan oleh jaringan pendukungnya. Dengan cara ini, Greenpeace berperan sebagai produsen sekaligus distributor informasi yang efektif. Selain berfungsi sebagai alat transportasi, kapal yang mereka miliki juga digunakan untuk mengumpulkan data lapangan dan mendukung mobilisasi aktivis, sehingga memperkuat integrasi antara aksi langsung, produksi pengetahuan, dan penyebaran informasi dalam setiap kampanye yang mereka lakukan (Eden, 2004).

Sebagai organisasi internasional yang berfokus pada isu lingkungan, Greenpeace mengelola jaringan global dengan kantor pusat di Belanda dan perwakilan di puluhan negara, termasuk Indonesia. Greenpeace Indonesia secara aktif menjalankan berbagai advokasi, terutama dalam isu deforestasi. Salah satu kasus penting terjadi ketika Greenpeace menekan Nestlé agar menghentikan kerja sama dengan pemasok yang terlibat dalam perusakan hutan, seperti Sinar Mas. Melalui kampanye yang intensif, Greenpeace tidak hanya berhasil memengaruhi kebijakan perusahaan, tetapi juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengadopsi kebijakan moratorium hutan. Selain itu, Greenpeace Indonesia juga menyoroti praktik deforestasi oleh perusahaan besar seperti Wilmar International sebagai bagian dari upaya memperluas tekanan terhadap aktor korporasi dalam rantai industri kelapa sawit (Syarifuddin dkk., 2017; Virgy, 2020).

Greenpeace Indonesia tidak membatasi perannya pada tekanan terhadap korporasi, tetapi juga secara aktif mengintervensi kebijakan publik di tingkat lokal. Organisasi ini mengorganisasi kampanye polusi udara di DKI Jakarta melalui berbagai aksi publik, termasuk pemasangan baliho dan aksi simbolik untuk menarik perhatian pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Greenpeace Indonesia juga mengadvokasi penanganan pencemaran Sungai Citarum

dengan memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah aliran sungai serta menekan pelaku industri agar menghentikan pembuangan limbah. Melalui rangkaian aksi tersebut, Greenpeace Indonesia secara konsisten menjaga isu lingkungan tetap berada dalam ruang publik sekaligus mendorong respons kebijakan yang lebih serius dari pemerintah (Ramadhona dkk., 2021; Budiman dkk., 2023).

Berbagai kasus yang ditangani oleh Greenpeace Indonesia menunjukkan bahwa organisasi ini tidak hanya menjalankan fungsi advokasi, tetapi juga mengoperasionalkan prinsip environmentalism dan keadilan lingkungan dalam praktik konkret. Melalui tekanan terhadap korporasi dan intervensi terhadap kebijakan publik, Greenpeace secara langsung menargetkan aktor-aktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan distribusi kerusakan lingkungan. Strategi kampanye yang mereka jalankan juga memperlihatkan bagaimana kesadaran ekologis diterjemahkan menjadi mobilisasi publik yang mampu memengaruhi kebijakan. Dengan demikian, Greenpeace Indonesia tidak hanya berperan sebagai bagian dari jaringan global, tetapi juga sebagai aktor lokal yang menjembatani antara wacana global tentang lingkungan dengan realitas ketidakadilan lingkungan di tingkat nasional.

4. Simpulan

Sebagai gerakan masyarakat sipil, Greenpeace merepresentasikan praktik nyata dari environmentalism yang lahir sebagai respons atas krusialnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Gerakan ini tidak hanya berangkat dari kesadaran ekologis, tetapi juga dari kesadaran akan adanya ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan. Dalam konteks tersebut, Greenpeace secara konsisten membangun aksi kolektif melalui kampanye dan konfrontasi langsung terhadap aktor korporasi dan negara yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Dengan demikian, aktivitas Greenpeace tidak sekadar bersifat advokatif, tetapi juga mencerminkan upaya sistematis untuk mengoreksi ketimpangan struktural dalam isu lingkungan yang berpotensi mengancam keberlanjutan kehidupan manusia.

Sejak awal berdiri hingga saat ini, Greenpeace menunjukkan peran strategis sebagai aktor non-negara yang mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik dan praktik korporasi. Organisasi ini tidak hanya menghadirkan kritik, tetapi juga mendorong solusi melalui pendekatan kampanye kreatif yang konfrontatif namun tetap non-kekerasan. Dalam konteks ini, keberadaan Greenpeace menegaskan pentingnya sinergi antara negara dan aktor masyarakat sipil dalam pengelolaan lingkungan. Tanpa keterlibatan aktif dari kedua pihak, eksploitasi sumber daya alam akan terus berlangsung tanpa kontrol yang memadai, sehingga memperbesar risiko kerusakan ekologis di masa depan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Alagappa, M. (2004). *Civil society and political change in Asia: Expanding and contracting democratic space*. Stanford University Press.
- Arianto, B. (2022). Melacak Gerakan Masyarakat Sipil Melalui Tagar #ReformasiDikorupsi di Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 51–68. <https://doi.org/10.24002/jik.v19i1.3994>
- Budiman, I., Poerwantika, T. R., & Hastuti, I. S. (2023). Optimizing The Role Of Greenpeace In The Citarum River Conservation Program, West Java. *Jurnal EduHealth*, 14(01), 77–84. Retrieved from <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/health/article/view/1354>
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2023). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage Publications.
- Doherty, B., & Doyle, T. (2013). *Environmentalism, resistance and solidarity: The politics of Friends of the Earth International*. Palgrave Macmillan.
- Doyle, T., & McEachern, D. (2007). *Environment and politics (3rd ed.)*. Routledge.
- Eden, S. (2004). Greenpeace. *New Political Economy*, 9(4), 595-610. <https://doi.org/10.1080/1356346042000311191>
- Eyerman, R., & Jamison, A. (1989). Environmental knowledge as an organizational weapon: the case of Greenpeace. *Social Science Information*, 28(1), 99–119. <https://doi.org/10.1177/053901889028001005>
- Finger, M., de Oliveira, M., & Zorzi, F. B. (2013). Environmental justice. *UFRGS Model United Nations Journal*, 1, 222-243.
- Greenpeace Indonesia. (2023). Sejarah Greenpeace. *Greenpeace Indonesia*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/sejarah-greenpeace/>
- Ibnu, S., Mukhadis, A., & Dasna, I. W. (2003). *Dasar-dasar metodologi penelitian*. Lemlit UM.
- Jenkins, J. C. (1983). Resource mobilization Theory and the study of Social Movements. *Annual Review of Sociology*, 9(1), 527–553. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.09.080183.002523>
- Lestari, S. Y. (2016). Environmentalism dan green politics: Pembahasan teoritis. *Community Pengawas Dinamika Sosial*, 2(2). <https://doi.org/10.35308/jcpds.v2i2.137>
- Maksum, M. (2016). Dinamika gerakan masyarakat sipil (Studi Tentang Konsorsium Rakyat Jombang Berdaulat (Krbj) Di Kabupaten Jombang). *Jurnal Trisula*, 1(4). 437-447
- Melucci, A. (1996). *Challenging codes: Collective action in the information age*. Cambridge

University Press.

Moleong, L. J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Nugraha, J. (2021). Greenpeace adalah organisasi lingkungan global. *Merdeka*.
<https://www.merdeka.com/jateng/greenpeace-adalah-organisasi-lingkungan-global-ketahui-sejarah-dan-tujuannya-klm.html>

Pepper, D. (1996). *Modern environmentalism: An introduction*. Routledge.

Plumer, B. (2015). The year that humans first began radically altering the planet. *Vox*.
<https://www.vox.com/2015/4/2/8335915/anthropocene-debate>

Rahmandani, F., & Samsuri. (2019). Malang corruption watch sebagai gerakan masyarakat sipil. *Jurnal Antropologi Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(1), 49–59.
<https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n1.p49-59.2019>

Ramadhona, R., Widiastuti, W., & Yuliawati, F. (2022). Greenpeace Indonesia Analysis as Pressure Group In Controlling Environmental Policy In Anies Baswedan Government (Study On The Role Of Greenpeace Indonesia On Policy Emphasis For Efforts To Improve Clean Air Quality DKI Jakarta). *International Journal of Social Sciences Review*, 2(2), 26–45.
<https://doi.org/10.57266/ijssr.v2i2.71>

Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press.

Susanto, S. R. (2007). The transformation of Greenpeace strategy in the 1990s. *Global & Strategic*, 1(2), 186–205.

Syarifuddin, E. A., et al. (2017). The market campaign strategy of Greenpeace in decreasing rainforest deforestation in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.

Tarrow, S. (2011). *Power in movement: Social movements and contentious politics (3rd ed.)*. Cambridge University Press.

Virgy, A. M., et al. (2020). Strategi jaringan advokasi transnasional Greenpeace Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(2), 74–91. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>

Wahyudin, B. (2020). Ancaman kenaikan muka air laut bagi negara kepulauan Pasifik. *Review of International Relations*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/rir.v2i1.15421>